

**PENGAWASAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI 3 KG OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG
(STUDI KASUS KELURAHAN PINANG KENCANA)**

Dewi Sri Lestari¹, Edy Akhyary², Fitri Kurnianingsih³

Dewisrilestari311@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Abstract

One of the roles that the government can play is to monitor the distribution of elpiji 3 kg to the public. Based on the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No.26 of 2009 concerning the Provision and Distribution of 3 kg LPG gas, it has been said that users of 3 kg LPG gas consist of households and micro businesses with provisions for households are families with lower economic class, namely with income below. Rp. 1.500.000, - (one million five hundred thousand rupiah) and is in the distribution area of subsidized 3 kg LPG. The distribution of LPG 3 Kg is carried out by the base as the last party for distribution. The purpose of this study was to determine the extent of supervision carried out by the Tanjungpinang City Trade and Industry Office in supervising the distribution of subsidized 3 kg LPG gas in Pinang Kencana Village. The research method used is descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews, documentation. In monitoring the distribution of subsidized 3 kg LPG gas, the researcher uses the theory of Maman Ukas (2006: 343), there are three indicators, namely setting standard sizes, making comparisons, taking corrective actions. The results of this study indicate that the Office of Trade and Industry of Tanjungpinang City has not been optimal and has not thoroughly supervised the distribution of 3 kg LPG, especially for the base area of Pinang Kencana Village, there are still bases that sell above the highest retail price (HET) and do not follow regulations, still There are many local retailers in Kelurahan Pinang Kencana who sell 3 kg of LPG gas resulting in much higher prices, inaccurate targeting of users of 3 kg LPG gas cylinders. There should be a working relationship between the Tanjungpinang City Trade and Industry Office with Pinang Kencana Village and the Community to jointly monitor the 3 kg LPG gas base so that fraud does not occur so that good cooperation is created.

Keywords : *Supervision, Distribution, Gas Epiji 3 Kg.*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas elpiji 3 kg telah dikatakan pengguna gas elpiji 3 kg terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi gas elpiji 3 kg Bersubsidi. Pendistribusian gas elpiji 3 Kg dilakukan oleh pangkalan sebagai pihak terakhir yang melakukan penyaluran. Dan untuk pengawasan juga sesuai dengan peraturan menteri energi sumber daya mineral No.26 tahun 2009, Berdasarkan pasal 32 dari aturan tersebut fungsi pembinaan dan pengawasan baik berupa kepatuhan terhadap ketetapan HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari lembaga penyalur kepada konsumen berada di tangan pemerintah. Dalam hal ini berarti pengawasannya dilakukan oleh pemda, baik provinsi, kabupaten maupun kota. untuk di Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas dalam pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Kemudian untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 432 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji tabung 3 kg bersubsidi di Kota Tanjungpinang menetapkan bahwa harga jual gas elpiji tabung 3 Kg adalah Rp. 18.000,- dan tidak boleh melebihi harga tersebut, apabila ada temuan di lapangan penjualan gas elpiji diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) pihak berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja. Untuk Kota Tanjungpinang memiliki 3 agen dan 192 pangkalan yang tersebar di 4 kecamatan, secara spesifik pangkalan elpiji untuk wilayah Kelurahan Pinang Kencana yang menjadi tempat penelitian memiliki 24 pangkalan elpiji yang menjadi sub penyalur, peneliti mengambil lokasi Kelurahan Pinang Kencana di karenakan berdasarkan data dinas perdagangan dan perindustrian untuk kelurahan pinang kencana memiliki pangkalan sebanyak 24 pangkalan paling banyak diantara daerah lainnya dan terjadi pelanggaran atau penyimpangan sebanyak 5 kali pengawasan dan paling banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

No	Pangkalan	Kelurahan	Agen
1	Andy meta	Pinang kencana	PT.MuliaBintanSejahtera
2	Abu satar	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
3	Efifiosifan	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
4	Kasmawati	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
5	Meike	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
6	Muri	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
7	Raya putri gas	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
8	Rosliawaty	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
9	Sahabat	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
10	Saihong	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
11	Suhaimi	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
12	Sumardi/adi	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
13	Sunardiono	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
14	Teratai	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
15	Tusino	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
16	Ulfah	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
17	Zulhendri	Pinang kencana	PT. Adri Jaya Sakti
18	Aulia/Sembiring	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
19	Hanifah/Djalal	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
20	Hokki	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
21	Rido Waluyo	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
22	Sri Winarti	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
23	Sumber Alam	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama
24	Sendy Gas	Pinang kencana	PT.Bumi Kharisma Pratama

Sumber data : Bidang Perdagangan 2019 (DISDAGIN)

Namun yang menjadi permasalahan yang spesifik adalah pada kenyatannya pelaksanaan

pengawasan terhadap penjualan Gas Elpiji 3 kg di Kelurahan Pinang Kencana, masih jauh dari yang diharapkan karena pemantauan yang dilakukan kurang efektif dalam pengawasannya, serta belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, dimana terdapat fenomena-fenomena dan gejala sebagai berikut :

1. Banyak dijumpai penjualan elpiji bersubsidi 3 kg di kedai kedai kecil yang tidak memiliki izin usaha penjualan, ini tidak dibenarkan adanya karena bertentangan dengan peraturan menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Elpiji yang penjual/pendistribusi Gas Elpiji 3 Kg adalah pangkalan Gas Elpiji 3 Kg.
2. Adanya konsumen yang membeli Gas Elpiji 3 Kg di atas harga enceran tertinggi (HET) ini juga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 432 tahun 2018 tentang penyesuaian Harga Enceran Tertinggi Gas Elpiji Tabung 3 Kg subsidi.
3. Penggunaan Gas Elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya Gas Elpiji 3 kg tersebut seharusnya yang berhak menggunakannya adalah rumah tangga dengan kelas sosial kebawah dan usaha mikro, tetapi ketika peneliti melihat fenomena yang ada bahwa siapa saja bisa membeli Gas Elpiji 3 kg tanpa terbatas.

Menurut (Maman Ukas 2006:343) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ukas mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yang terdiri atas :

1. Menetapkan standar ukuran.
2. Melakukan perbandingan
3. Melakukan tindakan koreksi.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan). (Tjiptono, 2008:585).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengawasan distribusi Gas Elpiji 3 kg bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana) dan tujuan dari penelitian ini adalah Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam mengawasi distribusi Gas Elpiji 3 kg bersubsidi di Kelurahan Pinang Kencana

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. jenis penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut (Sugiyono, 2009 : 226) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2009:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing*).

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Pengawasan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana) Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Andini Faisal dengan judul "Pengawasan distribusi Elpiji 3 kg di kelurahan Sidomulyo barat kecamatan tampan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru studi kasus : pangkalan Elpiji 3 kg". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap sub penyalur atau pangkalan Elpiji 3 kg dalam pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan distribusi Elpiji 3 kg pada tingkat sub penyalur atau pangkalan Elpiji 3 kg di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.
2. Bayu Anggara dan Syapril Abdullah dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Pekanbaru" (2017) Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penjualan gas Elpiji di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian Populasi dan Sampel dan pendekatan kuantitatif.
3. Saladdin Wirawan Effendy (2015) Universitas Jendral Soedirman dengan judul penelitian "Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Elpiji 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)" pada penelitian Saladdin Wirawan Effendy ini, adapun unsur perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus menganalisis tentang usaha bisnis distribusi gas elpiji ini mulai dari bagaimana caranya saluran distribusi dan harga gas elpiji, analisis mendapatkan keuntungan dari penjualan gas elpiji.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu objek penelitian yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (studi kasus Kelurahan Pinang Kencana). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori (Maman Ukas 2006:343) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ukas mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yang terdiri atas : Menetapkan standar ukuran, Melakukan perbandingan, Melakukan tindakan koreksi.

Pengawasan Distribusi gas elpiji 3 kg Bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana)

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Pengawasan Distribusi gas elpiji 3 kg Bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam mengawasi distribusi Gas Elpiji 3 kg bersubsidi di Kelurahan Pinang Kencana. Informan dalam Penelitian ini adalah Kepala Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan, Staf bagian bidang perdagangan, Pangkalan gas elpiji, Pihak Pengecer

dan Masyarakat. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teori Menurut (Maman Ukas 2006:343) terdapat tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yang terdiri atas : Menetapkan standar ukuran, melakukan perbandingan, melakukan tindakan koreksi.

1. Menetapkan Standar Ukuran

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Jika dihubungkan dengan penelitian peneliti, tahap pertama yang dilakukan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan yang nantinya ingin dicapai. Penetapan standar ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pendistribusian oleh sarana distribusi gas elpiji 3 kg dan tercapainya pendistribusian gas elpiji 3 kg tepat sasaran, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dengan Indikator pertama yaitu menetapkan standar ukuran, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang melakukan Pengawasan dengan menerapkan atau menetapkan beberapa standar-standar untuk pangkalan-pangkalan gas sebagai pihak terakhir yang mendistribusikan ke masyarakat dan menerapkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 gas elpiji 3 kg yaitu seperti menjamin standar dan mutu/spesifikasi elpiji yang ditetapkan oleh Menteri, menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku,menjamin ketepatan berat isi elpiji sesuai dengan persyaratan ukuran tabung elpiji yang didistribusikan sampai tingkat konsumen elpiji. Akan tetapi, saat peneliti ingin melihat SOP yang telah dibuat dari dinas terkait mengatakan SOP yang mereka buat hilang jadi mereka hanya menyebutkan saja SOP apa saja yang mereka terapkan saat pengawasan dan untuk jadwal pengawasan tidak ada jadwal yang tersusun untuk mereka lakukan saat turun lapangan hanya mengandalkan aduan masyarakat dan surat dari kepala dinas terkait.

2. Melakukan Perbandingan

Setelah ditetapkan suatu standar ukuran yang dijadikan sebagai alat ukur dalam melakukan pengawasan, tahapan kedua yang harus dilakukan adalah mengadakan tindakan perbandingan. Tindakan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan hasil suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Indikator kedua yaitu melakukan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa penetapan standar yang telah ditentukan setelah dilakukannya pelaksanaan perbandingan antara kebijakan yang ada dengan hasil dilapangan terlihat masih belum terlaksananya hasil yang maksimal karena penetapan standar ukuran yang ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak dipatuhi secara baik oleh pangkalan-pangkalan gas elpiji 3 kg, Dinas pun menjalankan fungsi pengawasan belum sepenuhnya dapat melakukan pengawasan dengan optimal sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berkelanjutan dalam pendistribusian Gas Elpiji 3 kg dari tingkat sub penyalur ke konsumen.

3. Melakukan Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi adalah langkah perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan Ketidak-sesuaian dalam proses audit. Setiap sistem operasi yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya dapatnya terjadi penyimpangan dari kondisi operasi standar prosedur yang

disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan wawancara diatas dengan Indikator yang ketiga yaitu melakukan tindakan koreksi, setelah dilakukannya perbandingan kerja nyata akan di temukannya beberapa penyimpangan yang terjadi, dari wawancara yang di lakukan peneliti menemukan bentuk tindakan koreksi yang bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg yaitu apabila ditemukan pangkalan yang melakukan penyimpangan pangkalan akan mendapatkan 3 kali teguran, teguran pertama teguran tertulis atau himbauan, teguran kedua pembinaan, teguran ketiga dinas akan menyurati ke agen untuk memutuskan hubungan kerja tidak mengisi kuota tabung gas elpiji ke pangkalan tersebut sehingga dinas mencabut rekomendasi izin usaha pangkalan. Tetapi, sayangnya untuk pihak pengecer atau warung yang menjual gas elpiji 3 kg tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan hanya himbauan saja agar tidak menjual kembali gas elpiji 3 kg padahal hal tersebut yang membuat harga menjadi lebih tinggi dan menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Distribusi gas elpiji 3 Kg bersubsidi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tanjungpinang (studi kasus Kelurahan Pinang Kencana) maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg oleh dinas perdagangan dan perindustrian belum maksimal karena masih banyak ditemukannya pihak pengecer, harga diatas HET, dan tidak tepat sasaran pendistribusian kepada masyarakat.

1. Dari indikator pertama, Menetapkan standar ukuran dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sudah baik menetapkan standar ukuran dengan mengikuti Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yaitu seperti menjamin standar dan mutu/spesifikasi elpiji yang ditetapkan oleh Menteri, menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku, menjamin ketepatan berat isi elpiji sesuai dengan persyaratan ukuran tabung elpiji yang didistribusikan sampai tingkat konsumen elpiji. Objek yang di awasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu adanya rekomendasi izin usaha, kuota elpiji dari agen, timbangan, tampungan air, alat pemadam api, logbook, fotocopy ktp serta mengawasi harga elpiji 3 kg yang sesuai peraturan Walikota Tanjungpinang berdasarkan surat keputusan Walikota Tanjungpinang.
2. Dari indikator yang kedua melakukan perbandingan, pelaksanaan pengawasan dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan pelaksanaan pengawasan ini dikatakan belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena dapat dilihat dari beberapa hal-hal yaitu dalam menetapkan standar ukuran setelah itu dilakukannya perbandingan antara kebijakan yang ada dengan hasil dilapangan yang terjadi terdapat beberapa hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah dibuat berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi lapangan, terdapat beberapa temuan yaitu:
 - a. Pengawasan terhadap penyediaan, masih ditemukannya pangkalan di daerah Pinang Kencana yang tidak mematuhi standar yang telah ditentukan yaitu tidak menyediakan perlengkapan seperti timbangan, tampungan air, alat semprot pemadam kebakaran karena perlengkapan tersebut penting guna mencegah dampak terjadinya kebocoran dan kebakaran di area pangkalan tersebut, selanjutnya mengisi logbook dan fotocopy ktp padahal untuk mendata siapa, berapa yang membeli gas elpiji 3 kg.
 - b. Pengawasan terhadap pendistribusian, proses pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg ini dapat dikatakan belum maksimal karena masih ditemukan adanya pangkalan yang menjual ke

- pengecer, warung kecil di daerah Pinang Kencana untuk dijual kembali dengan harga jauh dari HET, pengusaha restoran mewah, PNS, rumah tangga dengan penghasilan diatas Rp.1.500.000 menggunakan gas elpiji 3 kg, padahal gas elpiji 3 kg hanya boleh digunakan untuk kalangan rumah tangga kelas ekonomi bawah dengan penghasilan di bawah Rp.1.500.000 dan usaha mikro kecil.
- c. Pengawasan terhadap harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg, Penetapan harga terkait surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 432 Tahun 2018 tentang penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji tabung 3 kg bersubsidi di Kota Tanjungpinang menetapkan bahwa harga jual gas elpiji tabung 3 kg adalah Rp. 18.000, tetapi saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat daerah Pinang Kencana terdapat pangkalan yang menjual di atas Rp.18.000 dan masyarakat juga mengeluhkan harga gas elpiji 3 kg yang dijual di warung-warung pengecer. Dengan ini Pengawasan Terhadap harga eceran tertinggi gas elpiji 3 Kg, dapat dikatakan belum optimal, karena HET yang ditetapkan Walikota Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 3. Dari indikator yang ketiga melakukan tindakan koreksi, Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, untuk pangkalan yang melakukan penyimpangan akan mendapatkan 3 kali teguran, teguran pertama teguran tertulis atau himbauan, teguran kedua pembinaan, teguran ketiga dinas akan menyurati ke agen untuk memutuskan hubungan kerja untuk tidak mengisi kuota tabung gas elpiji ke pangkalan tersebut sehingga dinas dapat mencabut rekomendasi izin usaha pangkalan. Tetapi pada sistem tindakan koreksi ini belum berjalan maksimal karena untuk pihak pengecer atau warung yang menjual gas elpiji 3 kg tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan, hanya himbauan saja agar tidak menjual kembali gas elpiji 3 kg padahal hal tersebut dapat merugikan masyarakat membuat harga menjadi lebih tinggi dan menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Kadarman. (2001). *Sistem Pengawasan Management*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Sugiyono.(2009).”*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*”.Bandung:Alfabeta
- Suharsimi Arikunto (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,Cetakan Kelimabelas,PT. Asdi Mahasatya,Jakarta.
- Sujatmo. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Ukas,m. 2006. *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Agnini

Jurnal

- Andini Faisal, *Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru(Studi Kasus: Pangkalan Lpg 3 Kg)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Bayu Anggara dan Syapril Abdullah, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru* Vol. 3, No.2 Hal. 248-261 (2017) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIR.
- Saladdin Wirawan Effendy (2015) Universitas Jendral Soedirman dengan judul penelitian “Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)”.

Peraturan dan Dokumen :

- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Elpiji 3 kg.
- Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 432 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Tanjungpinang menetapkan bahwa harga jual Gas Elpiji tabung 3 Kg adalah Rp. 18.000.

Data Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Edy Akhyari, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang serta Bapak/Ibu Pangkalan, pengecer dan masyarakat bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.